

**MODEL *BLUE ECONOMY* DI KAWASAN ASIA PASIFIK (STUDI KASUS: PENERAPAN MODEL *BLUE ECONOMY* PADA INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA)**

Oleh :

**Wulandari Cahyasari**  
[Cahyasari64@yahoo.com.au](mailto:Cahyasari64@yahoo.com.au)

**Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, M.A**

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Pekanbaru**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293 - Telp/Fax. 0761-63277**

**Abstract**

*This research explains about blue economy models in Asia Pacific region, especially the implementation of the blue economy models in Indonesia fisheries industry. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) is a forum of economic cooperation countries of Asia Pacific which aims to improve the welfare and economic growth has a vision of marine and fisheries which competitive and sustainable for community welfare. To realize the vision of marine and fisheries development implemented by blue economy models.*

*This research used primary data which derived from interviews, official document government and APEC, and used secondary data which derived from review of the literature and also used qualitative methods with descriptive analysis approach, namely how to describe and analyze the various situation of the issues under study and to support the facts that occurred.*

*Based on the results of the research showed that the function of APEC seen its role to facilitate the economic growth of member countries with the agreement achievement the blue economy of commitment to form partnerships more integrated, sustained, inclusive and mutually beneficial. In addition, Indonesia has the potential of fishery commodities, Indonesia utilize the opportunity to contribute significantly in the implementation stage of blue economy models in sector of the fisheries industry.*

*Keywords: Blue Economy, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Sustainable Development, Fisheries Industry*

## Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji tentang *blue economy* di kawasan Asia Pasifik dan bagaimana bentuk penerapan model *blue economy* tersebut pada industri perikanan Indonesia. Forum kerjasama ekonomi terbuka Asia Pasifik yaitu *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dibentuk sebagai upaya untuk memajukan segala aspek kegiatan ekonomi di Asia Pasifik pada bulan November 1989 di Canberra-Australia. Dengan anggota sebanyak 21 negara yakni, Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipina, Russia, Singapore, China Taipei, Thailand, Amerika Serikat, Rusia, dan Vietnam.

APEC merupakan forum kerjasama yang telah melakukan langkah besar dalam menggalang kerjasama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebagai lembaga informal yang membangun kerjasama ekonomi yang berpedoman melalui pendekatan liberalisasi bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif. APEC memberikan kerangka untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi anggotanya melalui prinsip-prinsip liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi. Arah regionalisasi ekonomi di Asia Pasifik bisa di catat sebagai proses dari homogenisasi prinsip ekonomi liberal di kawasan ini. Semua anggota dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kerangka tersebut.

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada *ocean based economy*. Sebagai salah satu forum kerjasama ekonomi yang bersifat multilateral, ini dapat dijadikan kesempatan untuk menjadikan APEC sebagai salah satu instrument pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan model *blue economy* untuk mewujudkan kerjasama kemitraan antar anggota APEC dalam bidang kelautan dan perikanan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

APEC sendiri mendefinisikan *blue economy* sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*). Model ekonomi yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Pembangunan kelautan yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan (*unsustainable*) disebabkan oleh pola pembangunan yang kurang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tidak menerapkan pendekatan *supply chain system* secara terpadu, kurang inklusif dan tidak ramah lingkungan.

Optimalisasi kerjasama sektor kelautan dan perikanan dengan model *blue economy* dalam APEC juga didukung dalam *leaders declaration* pada KTT APEC di

Bogor, Poin ke 8 menyatakan bahwa "membangun dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk memperkecil kesenjangan ekonomi". Sumber daya alam tersebut termasuk potensi ekonomi kelautan, yaitu sektor perikanan. Asia Pasifik merupakan kawasan produsen ikan terbesar dan rumah terumbu karang terluas di dunia. APEC yang beranggotakan 21 negara telah menyumbang 100 juta ton produksi perikanan dari 141 juta ton produksi perikanan dunia. Untuk itu, sudah sepantasnya dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan dengan model ekonomi biru (*blue economy*) agar lingkungan tetap terjaga.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang diselenggarakan di Bali pada awal Oktober 2013 yang mengusung tema "*Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth*" memberi hasil positif bagi sektor kelautan. Pada poin ketiga pembahasan utama di KTT tersebut terkait konektivitas kelautan atau *blue economy* terdapat komitmen terhadap kebijakan lintas sektoral di bawah "*APEC Initiative on Mainstreaming Ocean-Related Issues*" yang tercantum dalam 2013 leaders' declaration. Yakni "...*maintain the health and sustainability of our oceans and coastal resources for the benefit of food security, poverty eradication, preservation of traditional culture and knowledge, conservation of biodiversity and facilitation of trade and investment*" dengan kesimpulan bahwa menjaga kesehatan dan keberlanjutan laut dan sumber daya

pesisir untuk kepentingan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan diperlukan integrasi kawasan Asia Pasifik dalam rangka kerjasama APEC menjadi satu dari sekian upaya untuk terus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan model *blue economy*.

## Pembahasan

Dengan tercapainya kesepakatan kerjasama *blue economy* yang disepakati oleh 21 negara Asia Pasifik sebagai fokus utama kerjasama kemitraan antar negara anggota APEC, selain menunjukkan terwujudnya regionalisasi *blue economy*, juga menjadikan model ini sebagai integral pembangunan nasional anggota APEC. APEC menyepakati model *blue economy* sebagai fokus utama kerjasama kemitraan yang mencakup inovasi sektor perairan, energi dan pasokan pangan. Semua ini dituangkan dalam Deklarasi Xiamen yang disahkan pada pertemuan Tingkat Menteri Kelautan APEC keempat (The 4<sup>th</sup> APEC Ocean-Related Ministerial Meeting/AOMM4) di Xiamen, Tiongkok pada 28 Agustus 2014.

Adapun komitmen APEC terkait *blue economy* adalah melakukan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap laut serta sumber daya kelautan, pengelolaan laut untuk ketahanan pangan, mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka, memerangi penangkapan dan perdagangan ikan ilegal dan memperbaiki manajemen

penangkapan ikan, meningkatkan pengelolaan keberlanjutan dari ekosistem kelautan serta meningkatkan perdagangan produk ikan dan kelautan secara terbuka dan bebas. Melalui kesepakatan itu, setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi, dan instrument berbasis pasar. Dalam tercapainya komitmen tersebut, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki komoditas perikanan yang potensial, memanfaatkan peluang itu untuk berkontribusi secara nyata dalam tahapan kebijakan dan implementasi model *blue economy* di sektor industri perikanan.

Sebelum Indonesia berencana melaksanakan kebijakan ekonomi dengan model ekonomi biru (*blue economy*), sebetulnya model ini sudah diterapkan di beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti, Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Mexico. Penerapan model *blue economy* di Indonesia dimulai sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil yang dilaksanakan selama Sembilan hari mulai 13-22 Juni 2012. KTT Pembangunan Berkelanjutan atau KTT Rio+20 diikuti oleh 191 negara yang dihadiri 105 kepala negara dan kepala pemerintahan dan 487 menteri.

Diskusi yang dilakukan oleh para kepala negara pada KTT Rio+20 ini menghasilkan dokumen

“*the future we need*” dengan menekankan *blue economy*. Pada kesempatan di Riocentro convention center itu presiden SBY menyampaikan pidato berjudul “*moving towards sustainability: together we must create the future we want*”. Alasan Indonesia untuk menerapkan model *blue economy* dilandasi oleh kenyataan kondisi geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (setelah Kanada), sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya laut karena pelestarian sumber daya laut ini akan berdampak pada cadangan sumber pangan masyarakat yang bisa diandalkan.

*Blue economy* pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli, seorang pendiri dan aktivis *Zero Emission Research Initiative (ZERI)* melalui bukunya yang berjudul ‘*The Blue Economy*’ dengan landasan konsepsi ‘*The blue economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs*’. Model *blue economy* dimaksudkan untuk menunjukkan kepada para intreprenuer, bahwa *the blue economy business model* memeberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi, social dan lingkungan karena system ini menggunakan sumber daya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien dan bersih, menghasilkan produk ekonomi yang lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan kesempatan untuk

memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil.

Menurut Gunter Pauli *Blue economy* berarti “*blue ocen – blue sky*”, dapat dipahami bahwa pendekatan model *blue economy* ini akan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, namun laut dan langit tetap biru. Defenisi *blue economy* juga disampaikan oleh Prof. Dr. Tridoyo Kusumantato pada seminar ‘*blue economy*’ tahun 2012 di Bogor, yaitu *blue economy* dapat dinyatakan sebagai “aktifitas ekonomi di pesisir dan laut yang didukung aktifitas ekonomi daratan yang memberikan kemakmuran bagi masyarakat serta dapat berlangsung secara berkelanjutan”. Disamping itu, WEN Quan (*National Marine Environmental Monitoring Center Dalian, China*) lebih menekankan ekonomi biru adalah kekuatan ekonomi laut.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi biru adalah efisiensi alam (*nature’s efficiency*) dalam arti, ekonomi biru mencontoh pada alam (ekosistem), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*). Kedua, Nir limbah (*zero waste*), limbah dari yang satu menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain, sehingga system kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energy eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk

mengalirkan nutrient dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh contributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip *blue economy*, kebijakan kelautan dan perikanan semestinya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan ekonomi sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk yang bernilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan, menekankan pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut, dalam rangka meningkatkan secara menyeluruh taraf pemanfaatan sumber daya laut.

Ekonomi biru dapat dilihat sebagai kebijakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan pembangunan dengan model ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environment* (melestarikan lingkungan). Terminologi *blue economy* telah diangkat dalam berbagai forum kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat *Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific*

*Economic Cooperation* (APEC) di Moskow pada bulan February 2012.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga telah berperan serta secara aktif diberbagai forum internasional untuk mengangkat *blue economy* di forum-forum penting, seperti Apec *Blue Economy* Forum di Tianjin, Cina pada awal 2012, Blue Economy Forum 2012 yang dihadiri para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta, Asia Conference on Ocean, Food Security and *Blue Growth* 2013 di Bali, The First *Blue Economy* Summit oleh SIDS yakni Small Island Developing States, 2013 di Abu Dhabi, the 8<sup>th</sup> World *Blue Economy* Conference 2013 di Madrid, dan The Global Ocean Action Summit 2014 di the Hague, dan beberapa pertemuan internasional lainnya. Forum-forum tersebut telah mengantarkan bangsa-bangsa di dunia ke tingkat kesadaran yang makin tinggi mengenai kepedulian terhadap laut dan perlunya kerjasama internasional untuk melindungi laut dari kerusakan.

Penggunaan pendekatan ekonomi biru sebagai model pembangunan kelautan nasional diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Keberhasilan dari ekonomi biru seperti pencapaian industrialisasi sektor kelautan selain dihadapkan pada kebutuhan tenaga kerja dan teknologi yang memadai, juga memerlukan terobosan-

terobosan, seperti perbaikan rantai hulu hingga hilir guna meningkatkan daya saingnya. Industrialisasi kelautan dalam konsep ekonomi biru didorong untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri, berbasis komoditas utama, wilayah dan sistem manajemen, pembangunan berkelanjutan serta transformasi sosial.

Pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru diharapkan dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumberdaya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Paradigm pembangunan kelautan dengan mengadopsi konsep ekonomi biru diharapkan dapat membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut. Hal ini sejalan dengan pengendalian ancaman pemanasan global, seperti: energi gas buang dan karbon sehingga dapat terwujud pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan pendekatan ekonomi biru, pembangunan ekonomi kelautan diharapkan mampu menjadi motor pembangunan nasional dan sumber pertumbuhan baru. Ekonomi biru tidak hanya diharapkan dapat memacu pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjaga kesehatan lingkungan melalui perekonomian rendah karbon (*low carbon economy*). Ekonomi

kelautan dengan model ekonomi biru dibangun berdasarkan 4 pilar, yaitu 1) integrasi pembangunan daratan dan kelautan, 2) pembangunan yang bersih, inklusif, dan berkelanjutan, 3) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui inovasi, dan 4) peningkatan pendekatan masyarakat yang adil, merata, dan pantas.

Dalam rangka mencermati pembangunan kelautan ekonomi Indonesia, maka sepatutnya mengkaji kembali bagaimana posisi bidang kelautan yang terdiri dari 7 sektor utama, yakni : sektor perhubungan laut, industri maritime, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral kelautan, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, berperan di masa lalu dan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia meletakkan dasar yang kuat bagi pembangunan negara kepulauan yang dapat memakmurkan rakyat nusantara (UU No.17 tahun 2007). Diketahui bersama bahwa bidang ekonomi kelautan masih merupakan sektor-sektor yang relative tertinggal bila dilihat dari rendahnya produktivitas tingkat pemanfaatan sumber daya, tingkat teknologi yang digunakan, tingkat kemiskinan, tingkat ramah lingkungannya, dan minat investasi skala menengah dan besar relatif kurang, serta besarnya capital yang dibutuhkan walaupun “*rate of return*” nya juga tinggi.

Seperti telah disebutkan bahwa dalam forum KTT Rio+20 di Brasil akhir Juni 2012, Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, telah menyatakan tentang ekonomi biru,

dimana laut menjadi bagian integral untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan diharapkan menjadi *grand design* konsep pembangunan ekonomi kelautan nasional masa depan. Dengan demikian, bagi Indonesia ekonomi biru merupakan gagasan model pembangunan ekonomi kelautan nasional yang diintegrasikan dengan aktivitas ekonomi daratan untuk mendapatkan nilai tambah yang maksimal dengan memanfaatkan modal sosial, keberlanjutan, dan pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas dan mengacu kepada tujuan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pada misi ke tujuh, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, Indonesia juga telah menerapkan model *blue economy* tersebut pada sektor industri perikanan. Sumber daya ikan memiliki arti penting baik sebagai sumber protein dan gizi pada makanan di banyak negara maupun kontribusinya yang semakin meningkat bagi keamanan pangan dunia. Dalam deklarasi *World Summit on Food Security* November 2009, diprediksikan keharusan negara-negara untuk meningkatkan *output* pertanian (termasuk perikanan) sebesar 70% sampai dengan tahun 2050 guna menjamin

pangan masyarakat dunia yang diperkirakan akan melebihi 9 miliar jiwa pada saat itu.

Saat ini industri perikanan nasional masih jauh tertinggal dibanding industri sejenis yang ada di negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Ketertinggalan industri dalam negeri disebabkan oleh industri pengolahan ikan belum berjalan maksimal. Secara umum, arah kebijakan pembangaunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan model *blue economy* telah dirumuskan sebagaimana yang telah tertuang kedalam visi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut: “pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”. Aspek daya saing ditekankan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, sementara itu aspek berkelanjutan yang merupakan esensi model *blue economy* telah diadopsi dan diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong peningkatan efisiensi sumber daya alam, system produksi tanpa limbah, dan kepedulian sosial.

Merujuk pada UU No.31/2009, tentang perikanan yang disempurnakan menjadi UU No.45/2009, Pasal 1, Ayat 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam

suatu sistem bisnis perikanan. Nilai ekonomi perikanan diperkirakan mencapai US\$ 47 miliar/tahun (Rp 470 triliun/tahun). Nilai ekonomi ini berasal dari perikanan tangkap dilaut (US\$ 10 miliar/tahun), perikanan tangkap di perairan umum (US\$ 2 miliar/tahun), perikanan budidaya (US\$ 30 miliar/tahun). Industri pengolahan hasil perikanan (US\$ 5 miliar/tahun).

Jika dilihat, produksi perikanan nasional memperlihatkan grafik naik mencapai 6,2% per tahun yaitu dari 1,66 juta ton pada tahun 2010 menjadi 12,38 juta ton pada tahun 2011. Capaian produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya yang terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 11,13% pertahun selama periode tahun 2010-2011 (Laporan Refleksi KKP Tahun 2012). Dengan potensi perikanan nasional tersebut, pendekatan model *blue economy* dalam industri perikanan harus diupayakan secara maksimal untuk menunjang pemanfaatan sumber daya ikan yang lebih optimal.

Lebih lanjut, pembangunan industri perikanan sebagai bagian dari program revitalisasi ekonomi nasional diarahkan pada empat langkah utama yaitu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perikanan dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan (*food security*) khususnya dalam konteks suplai protein yang berasal dari sumber daya ikan, peningkatan produktifitas, produksi dan daya saing produk perikanan, dan peningkatan upaya diversifikasi produk perikanan dalam

rangka meningkatkan nilai tambahnya. Dengan langkah-langkah utamanya adalah 1) mengoptimalkan dan memperkuat usaha dan industri perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang efisien, produktif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar internasional, 2) mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri pengolahan hasil perikanan yang efisien, nir-limbah dan terpadu dengan perikanan tangkap dan budidaya, 3) mengembangkan sistem pemasaran dan manajemen usaha perikanan yang transparan, adil, dan menguntungkan semua pihak, 4) mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri pengolahan hasil laut non-ikan yang efisien, nir-limbah, inovatif, kreatif dan terpadu dengan sentra-sentra produksi.

Dalam penerapan *blue economy* pada industri perikanan dilakukan sesuai dengan esensi *blue economy* yaitu efisiensi alam, minimalisasi limbah, serta inovasi dan kreatifitas. Dengan model ekonomi biru, pembangunan kelautan akan ditekankan pada aktivitas yang mengolah seluruh limbah hasil produksi menjadi input bagi produksi aktivitas ekonomi yang lain. Sehingga kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan harus diarahkan menjadi suatu sistem siklus produksi yang berkelanjutan, tentu prinsip inovasi dan kreativitas menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Inovasi tentu memerlukan dukungan pengembangan rekayasa teknologi yang baik, sementara kreatifitas membutuhkan peran kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni

dan professional. Kombinasi antara rekayasa teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, menjadi sangat penting dalam mendorong pengembangan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru. Kemudian pembangunan ekonomi kelautan dengan konsep ekonomi biru juga akan bertumpu pada integrasi hulu-hilir untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya kelautan yang sekaligus memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produknya, serta meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakatnya secara inklusif.

Kemudian, untuk penjabaran arah strategi tersebut diperlukan upaya-upaya berupa implementasi bisnis sektor perikanan yang dengan model ekonomi biru. Contoh implementasi ekonomi biru pada industri perikanan dengan efisiensi alam yaitu pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah, komoditas (ikan atau udang) dan diservikasi produk untuk dapat menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar namun dengan menggunakan sumber daya alam lebih hemat. Efisiensi sumber daya alam dapat ditingkatkan karena seluruh unsur yang terkandung didalam material/bahan baku dimanfaatkan sehingga tidak menyisakan limbah. Dalam arti seluruh bagian yang ada pada komoditi itu diolah dan dimanfaatkan untuk menaikkan nilai ekonomi komoditi tersebut, terkadang nilai itu lebih besar value nya daripada daging komoditi itu.

Seperti pada komoditi ikan tertentu, kebanyakan industri hanya mengolah kebutuhan ikan kaleng

atau fillet saja. Bagian lain seperti kepala, usus, insang dan tulang dibuang sebagai limbah, tetapi jika limbah itu diolah lagi maka akan memberikan nilai ekonomi baru dan ekonomi baru itu lebih ekonomis nilai ekonominya dari pada daging komoditi itu. Kemudian dengan menerapkan model *blue economy* melalui nir-limbah (*zero waste*), pengolahan ikan dalam industri selain untuk konsumsi manusia, limbahnya seperti kulit, kepala, kaki dan rostum dapat dimanfaatkan sebagai 'kitin' dan 'kitosan'. Kitin, merupakan senyawa yang berguna untuk pakan ternak dan kitosan merupakan serat alami yang berasal dari kulit udang yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Selain kitin dan kitosan, limbah yang masih dapat dimanfaatkan untuk dijadikan nilai tambah dari suatu proses produksi hasil perikanan adalah silase, gelatin, kolagen, dan minyak ikan. Selain itu, hasil cucian ikan atau udang juga dapat diolah menjadi pupuk cair.

Untuk mendukung pengolahan industri perikanan dengan minimalisasi limbah, perlu didukung dengan inovasi dan kreatifitas melalui teknologi yang ramah lingkungan. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan telah melakukan kajian hemat air dan lahan budidaya untuk kegiatan ekonomi, yaitu dengan menggunakan teknologi 'akuaponik'. Budidaya ikan dengan system akuaponik merupakan salah satu teknologi terapan hemat lahan dan air, kegiatan ini dikombinasikan dengan berbagai tanaman sayuran dan bunga,

sehingga konsep teknologi akuaponik dapat diterapkan pada usaha perikanan atau pelaku industri di perkotaan. Kegiatan budidaya dengan teknologi tersebut adalah teknik penyelamatan lingkungan sekaligus memberikan kontribusi pada kehidupan masyarakat, dapat dikatakan sebagai penyelamat ekonomi kerakyatan, karena dapat diterapkan pada lahan sempit.

Contoh lain implementasi *blue economy* dalam industri perikanan melalui inovasi dan kreatifitas adalah dengan menggunakan teknologi alat tangkap ikan yang efisien, efektif, ramah lingkungan, dan mampu menjamin kualitas ikan hasil tangkapan, pengembangan instalasi pendingin yang menggunakan tekanan air laut sebagai penggerak, instalasi produksi es balok/*ice cube* dengan bahan baku air laut, penggunaan *fish finder* yang dihubungkan dengan jaringan satelit yang dapat menghemat *route* pelayaran kapal ikan, penggunaan teknologi inovatif penyediaan benih unggul yang mengembangkan spesies baru, penggunaan teknologi budidaya yang berbasis *trophic level*, sirkulasi limbah keluaran yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri lainnya, pengolahan rumput laut terpadu, mulai sebagai bahan baku (turunan awal) hingga untuk berbagai produk turunan lainnya seperti: untuk produk farmasetika, bahan makanan, dan lain-lain.

Untuk meningkatkan industri perikanan dengan model ekonomi biru, juga dilakukan dengan konsep "ecoport". Yaitu pengembangan pelabuhan perikanan harus bersamaan dengan ekosistemnya,

seperti: pengumpul hasil dari para nelayan atau pembudidaya, penyimpanan (cold storage), pembersihan ikan, pembuatan fillet, mengepakkan untuk dipasarkan, market dan sebagainya. Dari hasil studi banding di Perancis, konsep ecoport ini sangat membantu masyarakat nelayan untuk proses pemasaran yang higienis, kemudian limbah-limbah ikan dan udang dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Sehingga pengembangan ekonomi biru dengan konsep ecoport dapat diterapkan di Indonesia.

Selain itu, pengembangan usaha dan investasi dengan model *blue economy* diarahkan untuk mendorong berkembangnya usaha atau industri dan investasi inovatif dan kreatif yang mampu meningkatkan kinerja bisnis dan investasi yang secara ekonomi dan sosial lebih menguntungkan, namun tidak merusak lingkungan. Pertimbangan perlindungan lingkungan dimaksudkan tidak untuk menghambat atau menyebabkan pengeluaran ekstra namun sebaliknya, yaitu menggunakan sumber daya alam atau komoditas yang lebih efisien namun menghasilkan produk dan pendapatan yang lebih besar dan tanpa limbah. Dengan system ini, setiap unsur yang terkandung di dalam bahan baku dimanfaatkan untuk dijadikan produk-produk yang bernilai tambah hingga tidak menyisakan apapun berupa limbah.

Pengembangan bisnis dan investasi dalam industri perikanan dengan model *blue economy* merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan sistem

manajemen laut yang baik yaitu, laut yang lebih produktif dan sehat, dengan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya kelautan, termasuk perikanan (productive ocean), sekaligus melindungi laut dari kerusakan, bahkan sehat (healthy ocean). Dengan model ini, pelaku bisnis dan investor dapat memanfaatkan setiap unsur yang ada pada bahan baku sebagai bahan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah. Dengan prinsip tersebut, keanekaragaman barang dan jasa dapat dihasilkan, sehingga memperbanyak kegiatan produktif dan mampu memperluas lapangan kerja.

## Simpulan

Pada tahun 2010 diperkenalkan *blue economy* oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul '*The Blue Economy*', yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh *United Nation Environmental Programme* (UNEP). Secara konseptual, prinsip dasar *blue economy* adalah sustainability atau berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini diartikan sebagai keadaan dimana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana yaitu secara ekologis berlanjut dan secara ekonomi menghasilkan manfaat. Kesadaran akan lingkungan dan keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi sosial oleh masyarakat dunia secara luas diinisiasi oleh para pemimpin negara-negara dunia untuk menerapkan model *blue economy* tersebut.

Suatu konsep yang telah dibentuk menjadi sebuah model, *blue economy* dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Selain karena limbah, kerusakan alam disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau daya dukung alam. *Blue economy* merupakan pedoman paling tepat yang diperlukan untuk membantu memperbaiki ekonomi yang rusak dan membuat model yang lebih berkelanjutan. Ide-ide baru dan pemikiran inovatif yang terangkum didalamnya, menawarkan pilihan-pilihan baru yang menarik mengenai bagaimana mengubah ekonomi agar dapat membuat lapangan pekerjaan baru sekaligus mempertahankan kehidupan sosial yang sehat untuk kedepan.

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan model *blue economy* sebagai landasan pola pembangunan ekonomi kelautan dengan fokus pada *ocean based economy*. *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang merupakan salah satu forum kerjasama bidang ekonomi yang bersifat multilateral, ini dapat dijadikan APEC sebagai instrument pelaksanaan kesepakatan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan diantara negara anggota dengan model *blue economy*.

APEC mendefinisikan *blue economy* sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

(*sustainable*), model ekonomi yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Sementara itu Food Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan *blue economy* sebagai konsep yang menekankan pada perlindungan dan manajemen yang berkelanjutan, karena ekosistem laut yang sehat akan menjadikan laut lebih produktif dan hal tersebut merupakan kharusan bagi ekonomi yang berbasis kelautan. FAO juga menyebutkan *blue economy* dapat menghilangkan praktek penangkapan ikan yang berbahaya dan berlebihan serta digantikan dengan pendekatan insentif yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan perlindungan, membangun perikanan yang berkelanjutan.

Beralih pada terminologi diatas, Indonesia sendiri mendefinisikan *blue economy* sebagai aktifitas ekonomi berbasis dan berorientasi laut, berdasarkan optimalisasi modal sosial, minimalisasi limbah serta pengembangan inovatif untuk kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem (*blue economy is Ocean-based economy characterized by optimized social capital, minimized waste and innovative development towards achieving people's welfare, economic growth and ecosystem sustainability*).

Keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan memerlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan

berpihak terhadap kepentingan masyarakat serta lingkungan. Pembangunan tersebut harus didasarkan pada keterpaduan geografis, keterpaduan ekologis, keterpaduan antar stakeholders, keterpaduan antar sektor, dan keterpaduan antar ilmu pengetahuan. Kelautan sebagai bidang yang terdiri dari multisektor, memerlukan sebuah kebijakan yang sinergis pada sektor ekonomi kelautan mengingat keterkaitan yang erat antar aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun diluar sektor, sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan.

Dalam rangka menyusun keterpaduan dan keharmonisan pembangunan ekonomi kelautan sehingga berkelanjutan, maka penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dengan model ekonomi biru dalam pembangunan nasional menjadi suatu keharusan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka wilayah pesisir, laut dan lautan adalah tumpuan harapan yang harus dikembangkan secara lestari terutama dalam industri perikanan. Karena Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar yang harus dimanfaatkan secara efisien sehingga menghasilkan revenue yang tinggi tanpa harus merusak ekosistem.

Dengan itu, penerapan model blue economy secara berdampingan dalam perencanaan pembangunan Indonesia membawa dampak positif bagi kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan serta lingkungan. Perencanaan pembangunan dengan menerapkan model ekonomi biru memiliki

konsekuensi pada perubahan paradigma perilaku masyarakat untuk lebih cinta lingkungan, lebih memperhatikan sumber daya hayati, dan berusaha untuk menjaga kelesatriannya. Dengan demikian, cita-cita luhur yang tertuang dalam perencanaan pembangunan Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat bisa terlaksana melalui kebijakan blue economy ini, mengingat penerapan model blue economy membawa dampak berantai pada tumbuh kembangnya usaha-usaha yang mengandalkan kekayaan laut dan lingkungan.

### Daftar Pustaka

- Acker, H and S Hodgson, “*Legal Aspects Of Maritime Spatial Palnning*”, Final Report to DG Maritime Affairs & Fisheries, European Commission, No. FISH/2006/09-LOT2, 2008
- Affandi, Anhar Rizki 2012, “*Indonesia Bertekad Capai Blue Economy*”, VIVA News edisi 9 Juni 2012
- Agoes, E R, “*Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*”, Jurnal Hukum Internasional-Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Firmansyah, “*Ekonomi Biru Paradigma Baru Pembangunan*”

- Universitas Indoensia,  
Jakarta, 2012
- Gouxing, J, “*SLOC Security in the Asia Pacific*”, Asia Pacific centre for security studies, Honolulu, USA, 2000
- Jusuf, Gellwynn 2012, “*Ekonomi Biru Menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan*”, Siaran Pers Tanggal 6 Juni 2012
- Kimbal, L A, “*International Ocean Governance: Using International Law and Organizations to Manage Marine Resources Sustainability*”, IUCN, Cambridge-UK.
- Pauli, Gunter 2006, “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”, Paradigm Publication
- Republik Indonesia, Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Sekretariat Negara, Jakarta 2007
- Sunoto Dkk, “*Term of Reference Blue Economy: Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat*”, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta 2012
- Sutardjo, Sharif C, 2012, “*Ekonomi Biru dan Industrialisasi Kelautan Perikanan*”
- UNEP, “*Large Marine Ecosystems Report A Perspective On Changing Conditions In LMEs Of The World’s Regional Seas*”, United Nations Environment Programme, USA, 2009